

## **Peran *Stakeholder* dalam Implementasi *Full Day School* di Kota Singkawang**

Ida Rochmawati  
Program Studi Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

Email: ida.rachmawati@fisip.untan.ac.id

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana dan apa saja peran para stakeholder dalam implementasi Full Day School Di Kota Singkawang. Penerapan kebijakan sekolah 5 hari atau yang di kenal dengan kebijakan *full day school* Tingkat sekolah dasar dan menengah pada tahun 2017 ini sudah di berlakukan. kebijakan tersebut tidak terlalu mulus, ada yang mendukung, tetapi ada juga yang menolak. Tujuan program ini ialah untuk mencapai keseimbangan antara kemampuan akademik dengan keunggulan karakter. Jika dilihat dari segi tujuan, program ini sangatlah pantas untuk diterapkan. Namun melihat kondisi geografis dan sosial-budaya di setiap daerah tidaklah sama membuat program ini perlu untuk dikaji lebih dalam. Dalam kontek dengan program FDS ini peran stakeholder sudah sesuai dengan status tertentu yang di punyai dalam mendukung program pemerintah FDS

### **Kata Kunci:**

Peran, Stakeholder, *Full Day School*

### *Abstract*

*This research aims at finding out the extent and the roles of stakeholders during the implementation of Full-day School (FDS) program in Singkawang City. The program has started since 2017 and regulates a five-day schooling system which is better known as Full-day School program. Thus far, it is applied to elementary and secondary education. This program does not run very well as it triggers some pros and cons. The purpose of this program is to balance student's academic skills and characters. If we look at its purpose, this program deserves to apply. However, geographical conditions and community's socio-culture in every region are different provoking this program to be re-evaluated. In this context, the roles of stakeholders have been in line with prescribed status in order to support the government's FDS program.*

### **Keywords:**

*Roles, Stakeholders, Full-day School*

## PENDAHULUAN

Seiring dengan bergantinya pemerintahan dari era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Pemerintahan Joko Widodo, maka kebijakan di semua sector akan mengalami perubahan juga. Dulu kita sering mendengar ganti presiden ganti kebijakan...begitu pula ganti menteri ganti juga kebijakannya. Pendidikan salah satu sector yang mengalami beberapa perubahan kebijakan. Pertama, perubahan tata pengelolaan SMA dan SMK yang semula di menjadi kewenangan Kabupaten/Kota sekarang menjadi kewenangan propinsi.

Tingkat sekolah dasar dan menengah pada tahun 2017 ini sudah di perlakukan kebijakan sekolah 5 hari sekolah atau yang di kenal dengan kebijakan *full day school*. Beragam pandangan muncul sehari setelah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengumumkan akan memperpanjang jam sekolah dasar dan menengah. Ada yang mendukung, tetapi tidak sedikit pula yang menentangnya.

Mereka yang mendukung mengatakan gagasan kebijakan yang diambil dari sistem pendidikan dasar dan menengah di Finlandia itu akan menghasilkan sumber daya manusia berkualitas karena sejak awal siswa diberi pendidikan karakter. Tetapi mereka yang menolak rencana kebijakan itu menilai infrastruktur dan luas wilayah Indonesia tidak memungkinkan menerapkan kebijakan seperti Finlandia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan rencana perpanjangan jam sekolah dasar dan menengah itu berawal dari keinginan mengimplementasikan Nawacita atau agenda prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo. Untuk itu, Muhadjir ingin mengubah porsi pendidikan di tingkat sekolah dasar menjadi 70 persen pendidikan karakter dan 30 persen pendidikan pengetahuan. Sementara di

tingkat sekolah menengah, angka itu diubah menjadi 60 persen pendidikan karakter dan 30 persen pendidikan pengetahuan.

Tentu kebijakan ini sangat tiba-tiba menurut saya mengingat beliau baru 2 hari menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, pertanyaan mendasar bagaimana persiapan infrastruktur pendidikan di Indonesia, bagaimana penerimaan dari target group dan bagaiman peran stakeholder dalam implementasi kebijakan tersebut dan bagaiman sebuah kebijakan dapat dirumuskan secara tiba-tiba tanpa kajian akademik yang matang.

Berikut tiga alasan Menteri Muhadjir:

### 1. Tidak ada mata pelajaran

Menurut Muhadjir, *full day school* adalah pemberian jam tambahan. Tapi dalam jam tambahan tersebut tidak ada mata pelajaran yang bisa membuat para siswa bosan. Kegiatan yang dilakukan adalah ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler tersebut akan merangkum hingga 18 karakter, seperti jujur, toleransi, disiplin, hingga cinta tanah air. Dengan kegiatan tersebut, dia mengatakan para siswa bisa dijauhkan dari pergaulan yang negatif.

### 2. Orang tua bisa jemput anak ke sekolah

Pertimbangan lain dari program *full day school* adalah masalah hubungan antara orang tua dan anak. Menurut Muhadjir, untuk masyarakat yang tinggal di perkotaan, pada umumnya orang tua bekerja hingga pukul 5 sore. Dengan program tersebut, kata dia, orang tua bisa menjemput anak mereka di sekolah saat pulang kerja.

Sata ini, kata Muhadjir, siswa pulang dari sekolah pukul 1 siang, sementara orang tua baru pulang pukul 5 sore. "Antara jam 1 sampai jam 5 kita enggak tahu siapa yang bertanggung jawab pada anak, karena sekolah juga sudah melepas

sementara keluarga juga belum ada," kata Muhadjir.

### 3. Membantu sertifikasi guru

Program *full day school* dianggap Muhadjir dapat membantu guru untuk mendapatkan durasi jam mengajar 24 jam per minggu sebagai syarat mendapatkan sertifikasi guru. "Guru yang mencari tambahan jam belajar di sekolah nanti akan mendapatkan tambahan jam itu dari ini," katanya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan hanya terfokus penelitian, yaitu: melihat peran para stakeholder dengan mengidentifikasi dan memaparkan tugas dan peran para stakeholder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui :

### a. Wawancara

Pengumpulan data primer dilakukan dengan mewawancarai peserta didik dan guru, guna mendapatkan gambaran jelas terhadap perubahan kewenangan dalam pengelolaan pendidikan atas dan khusus. Wawancara di lakukan secara tidak terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang berisi garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

### b. Triangulasi

Untuk tercapainya kredibilitas penelitian, peneliti melakukan upaya membandingkan data dari hasil penelitian baik dari wawancara yang telah dilakukan dengan data lain. Triangulasi akan membantu peneliti untuk mendapatkan data yang jelas tentang permasalahan yang menjadi obyek dalam penelitian ini.

## PEMBAHASAN

### Konsep Pilihan Publik dan Perubahan Kebijakan

Sementara itu dalam buku berjudul *Public Choice and Policy Change The Political Economy of Reform in*

*Developing Countries*, Merile S Grindle dan John W Thomas (1991) mengungkap banyak sisi tentang konsep pilihan publik dan perubahan kebijakan di negara dunia berkembang dalam perspektif ekonomi politik. Bagi Grindle perubahan kebijakan yang terjadi pada tahun 1980 sampai 1989 di negara berkembang menandai terjadinya perubahan yang mendasar dalam kebijakan publik di dunia. Mereka mencontohkan kebijakan perestroika di Uni Soviet telah mampu mengubah hegemoni dari aparat birokrasi pemerintah yang semula sentralistik menjadi lebih efisien dan dinamis dalam hal ekonomi. Demikian halnya yang terjadi di Eropa Barat, perbaikan ekonomi telah mendukung adanya perubahan politik. Sukses Mao dalam desentralisasi di Cina, juga mengubah watak birokrasi yang semula berkuasa penuh secara hirarkis dan bersifat kaku di bawah kontrol negara menjadi lebih baik berkat adanya persaingan pasar. Grindle juga menunjukkan perubahan kebijakan dalam bentuk lain seperti yang terjadi di Inggris Raya dan Amerika Serikat yang semula konservatif menjadi terbuka terhadap perubahan kebijakan berkat adanya inisiatif kebebasan individu dan persaingan pasar, sehingga meningkatkan tanggungjawab pemerintah dalam ekonomi dan kesejahteraan rakyat sebagai suatu pilihan publik.

Perubahan kebijakan dari perspektif ekonomi politik di negara berkembang menjadi pengalaman berharga bagi para pejabat publik dalam melakukan reformasi kebijakan meskipun motivasi mereka berbeda-beda, seperti motif untuk kepentingan sendiri, kepentingan kelas atau kepentingan organisasi yang disadarinya memiliki peran yang hebat. Namun satu hal yang membuat mereka optimis adalah munculnya pemahaman tentang konsep pilihan publik bahwa perubahan kebijakan itu dilakukan untuk kepentingan publik demi kesejahteraan masyarakat. Bagi Grindle perubahan

kebijakan dengan demikian telah berorientasi kepada upaya untuk memenuhi kepentingan publik baik di tingkat perumusan maupun implementasi kebijakan menuju masa depan yang lebih baik.

Grindle secara khusus juga menjelaskan tentang kajian ekonomi politik dalam reformasi kebijakan, salah satunya diindikasikan oleh adanya reformasi ekonomi dan reformasi organisasi khususnya yang menyangkut; bagaimana agenda *setting* (reformasi kebijakan menjadi bagian dari agenda), pembuatan kebijakan (bagaimana elit-elit kebijakan menerima perubahan kebijakan dan perubahan kelembagaan), serta implementasi kebijakan (pandangan politik tentang perubahan dan tekanan ekonomi politik pada kebijakan, dampak keputusan atas eksistensi kebijakan dan relasi birokratik, serta keberlanjutan implementasi pada administrasi yang efektif, bukan proses politik sebagaimana Grindle menjelaskan:

*Our in the process of policy and institutional change has led us to investigate policy decision making and implementation within government. We are concerned centrally with the issue of reform, defined here as deliberate efforts on the part of government to redress perceived errors in prior and existing policy and institutional arrangements* (Grindle, 1991 h 4). (Proses kebijakan dan perubahan kelembagaan telah kita telusuri kepada pembuatan keputusan publik dan implementasinya dalam pemerintah. Perhatian kami terpusat kepada isu-isu reformasi sebagai usaha pertimbangan yang mendalam atas bagian dari pemerintah yang merasa gagal dalam kebijakan dan susunan kelembagaan yang ada sebelumnya.

Selanjutnya Grindle mengajukan empat tesis dalam menganalisis situasi reformasi yang terkait dengan politik dan kebijakan di negara berkembang, yaitu:

#### 1) Elit-elit Kebijakan

Pada intinya mengasumsikan bahwa peran dari pembuat keputusan dan manajer dalam proses kebijakan bertindak sebagai *'rent-seekers'* dan didasari oleh hasrat pada kekuasaan untuk kepentingan pribadi yang mendasari dari seluruh tindakan politik mereka, sehingga perubahan dilakukan secara tambal-sulam (bersifat *incremental*) karena negara tertawan. Tindakan elit-elit kebijakan dalam melakukan perubahan kebijakan seperti ini sebagaimana yang terjadi di Korea, Kosta Rika, Filipina, Gana, India, Argentina dan Kolombia. Perubahan *incremental* demikian dipengaruhi oleh nilai, pengalaman dan persepsi dari elit kebijakan, sejarah, politik dan konteks kelembagaan sebagai dasar dalam memahami reformasi.

#### 2) Faktor-faktor Inisiatif Kebijakan

Munculnya inisiatif kebijakan dipandang sebagai dampak dari dinamika dan proses pembuatan keputusan diantara elit-elit kebijakan. Dalam perspektif ini sebuah reformasi tidak didasari atas agenda kebijakan dan pemikiran mendalam dalam pemerintahan. Sebaliknya reformasi dilakukan akibat kondisi krisis sebagaimana yang terjadi di Gana, atau reformasi dalam pengertian sebagai 'kebiasaan politik' seperti kasus di Kolombia yang mengandaikan tipe dari pejabat publik dalam pembuatan keputusan, perubahan dan waktu dari pembuatan keputusan. Dalam konteks ini maka reformasi dipandang sebagai respon dari elit-elit kebijakan dalam menghadapi krisis. Perubahan kebijakan dalam konteks ini cenderung bersifat inkremental.

#### 3) Situasi Reformasi Kebijakan

Pembuat kebijakan melakukan reformasi dengan menggunakan beberapa kriteria seperti; diskusi, debat, perencanaan dimana keputusan direspon berdasarkan aspek teknis dari area kebijakan di bawah konsiderasi dampak dari pilihan kebijakan atas interaksi

birokratis dengan orientasi perubahan untuk stabilitas politik dan dukungan politik serta peran aktor-aktor internasional dalam proses reformasi. Model reformasi seperti itu, terjadi di Kroasia, Kosta Rika, Kenya, Mali dan Argentina.

#### 4) Karakteristik Reformasi

Reformasi diindikasikan adanya konflik dan oposisi dalam sebuah kebijakan. Implementasi kebijakan menjadi arena politik atau arena birokratik, contoh; pengelolaan kebijakan dalam kasus suplai air publik di India dimana pembuat keputusan memainkan peran penting dalam mempertajam kebijakan dan hasil kelembagaan dan proses isu-isu atas agenda reformasi melalui pertimbangan yang mendalam (deliberasi) dalam pemerintah tentang bagaimana, mengapa dan kapan sebuah perubahan dilakukan. Dalam konteks sejarah, koalisi, konflik, oposisi dan dukungan, hambatan dan peluang seputar isu-isu publik dalam menjelaskan formasi isu, pembuatan dan implementasi kebijakan. Faktor-faktor sosial demikian menjelaskan tindakan pemerintah seperti; persepsi, motivasi, nilai, keterampilan/skill, peluang dari pembuat keputusan dan karakteristik dampak dari proses pembuatan keputusan atas pilihan-pilihan yang dibuat sebagai kalkulasi dalam desain kebijakan publik di negara berkembang dan indikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan.

Menyangkut elit-elit kebijakan dalam proses reformasi, Grindle menjelaskan sebagai berikut:

1. Elit-elit kebijakan tidak sepenuhnya determinan oleh kepentingan dari kelas sosial, kelompok terorganisir, aktor-aktor internasional atau kondisi ekonomi internasional atau oleh pengembangan sejarah dan budaya atas suatu pilihan kebijakan. Faktor-faktor determinan dari pilihan, termasuk isu, pembuat kebijakan, manuver dan kemungkinan mempengaruhi isi, waktu

dan ruang dari manuver mempengaruhi sebuah "ruang kebijakan." Ruang kebijakan dibatasi oleh;

- (1) Elit-elit kebijakan dan kemampuan mereka dalam memanfaatkan teknis, ekonomi, politik dan sumberdaya birokratik.
  - (2) Ruang kebijakan juga dibatasi oleh area isu, karena isu-isu membedakan biaya dan keuntungan atas kelompok sosial yang memiliki perbedaan kapasitas untuk mengenalkan dan mempertahankan kepentingan mereka.
2. Elit-elit kebijakan memainkan peran penting dalam mendefinisikan isu-isu kebijakan. Contoh; kemiskinan di pedesaan sebagai akibat dari relasi dengan elit-elit pedesaan yang bersifat eksploitatif. Masalah demikian terkait dengan arena kebijakan, profesional dalam disiplin khusus, nilai personal, ideologi atau studi, debat dan diskusi.
  3. Ide pembuat keputusan tentang solusi pada perubahan yang bersifat khusus. Pembuat keputusan dapat mengubah ide-ide mereka tentang kelayakan solusi pada masalah khusus, kekayaan kebijakan dan pengelolaan pengalaman; kolega, pejabat-pejabat dan yang lain di negara berkembang pada potensi untuk pembelajaran dan refleksi pembuat keputusan tidak dapat dipahami sepenuhnya sebagai "*rent seeking*" atau hasil dari latar belakang kelas atau manuver birokratik, tetapi merefleksikan eksistensi dari orientasi pemecahan masalah para pejabat. Pada kenyataannya elit-elit kebijakan dapat merubah ide mereka tentang konstitusi sebuah masalah dan bagaimana memecahkannya dipengaruhi oleh pengaruh pejabat pada isi dari inisiatif reformasi.
  4. Pengalaman yang mempengaruhi perubahan tidak normal dan tidak biasa. Pada kenyataannya dalam pemerintahan sejumlah pejabat melakukan studi

harian, diskusi dan debat tentang bagaimana memperbaiki, mengubah dan eksistensi kebijakan dalam prakteknya. Pada saat yang sama terdapat respon pada masyarakat dan tekanan internasional, tetapi pada waktu yang lain terdapat respon dari pejabat publik untuk memastikan tujuan secara efektif. Politik menyatu dalam penyedia layanan disamping ke dalam motivasi dari pembuat keputusan dan dampak atas birokratik dan konflik politik. Perubahan kebijakan di Korea Selatan dan Kosta Rika diindikasikan dari perhatian elit-elit kebijakan dalam mengangkat isu yang bersifat konfrontatif.

Sementara faktor kontekstual dari inisiatif reformasi dipengaruhi oleh proses *agenda setting* dan pembuatan keputusan. Dengan kata lain bahwa perubahan kelembagaan menjadi faktor determinan dari implementasi kebijakan sebagaimana kasus di Indonesia, Ghana, Jamaika dan India. Dengan demikian elit-elit kebijakan memiliki peluang melakukan manuver dalam melakukan inisiatif reformasi.

Pada kenyataannya, sebagaimana Grindle mengasumsikan bahwa;

- (1) Pembuat keputusan tidak dibatasi oleh keputusan kelas sosial, kepentingan organisasi sosial, aktor-aktor internasional atau kondisi ekonomi internasional, tetapi oleh ruang untuk mengartikan komitmen, waktu dan konsekuensi inisiatif kebijakan.
- (2) Pembuat keputusan mengartikulasikan penjelasan logis dari masalah-masalah mereka didasari atas pengalaman, studi, nilai personal, ideologi, afiliasi kelembagaan atau pelatihan profesional.
- (3) Pembuat keputusan menerima aktivitas dan peran formatif dalam mempertajam reformasi pada

kepentingan dalam masyarakat atau dalam pemerintah.

- (4) Terkait dengan perubahan dalam kebijakan publik dan kelembagaan adalah bersifat normal dalam proses kebijakan. Dari perspektif masyarakat, perubahan kebijakan publik dipahami sebagai relasi dari kekuasaan dan persaingan individu, kelompok atau kelas dalam masyarakat atau ekstensi internasional dari kelas dasar atau kepentingan dasar masyarakat. Sebaliknya perspektif teori lain berkeyakinan bahwa bahwa elit-elit kebijakan tidak dibatasi oleh keputusan masyarakat.

Pada konteks ini, Grindle menggolongkan elit-elit kebijakan terdiri dari presiden, perdana menteri, menteri keuangan, direktur Bank Central, kelompok kecil teknokrat tingkat tinggi, kepala negara dan menteri; birokrasi eksekutif, legislator, kepentingan masyarakat, kepentingan bisnis, elit-elit agama, militer, organisasi pekerja, dan media. Di negara berkembang model perubahan kebijakan mencerminkan aktivitas dari kepentingan terorganisir dalam masyarakat. Selanjutnya Grindle membagi dua model pelaksanaan reformasi yaitu model linier dan model interaktif. Reformasi kebijakan sebagai proses, salah satunya dengan kepentingan partai dapat menekan perubahan. Beberapa kepentingan mungkin efektif pada pengaruh pejabat tingkat tinggi dalam pemerintahan yang lain manajer dari proses implementasi atau siapa yang mengontrol sumberdaya dalam implementasi kebijakan.

### **Konsep Stakeholder**

Istilah stakeholders sudah sangat populer. Kata ini telah dipakai oleh banyak pihak dan hubungannya dengan berbagi ilmu atau konteks, misalnya manajemen bisnis, ilmu komunikasi, pengelolaan

sumberdaya alam, sosiologi, dan lain-lain. Lembaga-lembaga publik telah menggunakan secara luas istilah stakeholder ini ke dalam proses-proses pengambilan dan implementasi keputusan. Secara sederhana, stakeholder sering dinyatakan sebagai para pihak, lintas pelaku, atau pihak-pihak yang terkait dengan suatu isu atau suatu rencana.

Freeman (1984) mendefinisikan stakeholders sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. Sedangkan Biset (1998) secara singkat mendefinisikan stakeholder sebagai orang dengan suatu kepentingan atau perhatian pada permasalahan. Stakeholder ini sering diidentifikasi dengan suatu dasar tertentu sebagaimana dikemukakan Freeman (1984), yaitu dari segi kekuatan dan kepentingan relatif stakeholder terhadap isu, Grimble and Wellard (1996), dari segi posisi penting dan pengaruh yang dimiliki mereka.

Berdasarkan kekuatan, posisi penting, dan pengaruh stakeholder terhadap suatu isu, stakeholder dapat dikategorikan kedalam beberapa kelompok yaitu stakeholder primer, sekunder dan stakeholder kunci. Stakeholder utama merupakan stakeholder yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program, dan proyek. Mereka harus ditempatkan sebagai penentu utama dalam proses pengambilan keputusan. Misalnya masyarakat dan tokoh masyarakat, masyarakat yang terkait dengan proyek, yakni masyarakat yang diidentifikasi akan memperoleh manfaat dan yang akan terkena dampak (kehilangan tanah dan kemungkinan kehilangan mata pencaharian) dari proyek ini. Sedangkan tokoh masyarakat adalah anggota masyarakat yang oleh masyarakat ditokohkan di wilayah itu sekaligus dianggap dapat mewakili aspirasi masyarakat. Di sisi lain, stakeholders utama adalah juga pihak manajer Publik

yakni lembaga/badan publik yang bertanggung jawab dalam pengambilan dan implementasi suatu keputusan.

Stakeholder pendukung (sekunder) adalah stakeholder yang tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan, program, dan proyek, tetapi memiliki kepedulian (concern) dan keprihatinan sehingga mereka turut bersuara dan berpengaruh terhadap sikap masyarakat dan keputusan legal pemerintah. Yang termasuk dalam stakeholders ini misalnya lembaga(Aparat) pemerintah dalam suatu wilayah tetapi tidak memiliki tanggung jawab langsung, lembaga pemerintah yang terkait dengan isu tetapi tidak memiliki kewenangan secara langsung dalam pengambilan keputusan, Lembaga swadaya Masyarakat (LSM) setempat : LSM yang bergerak di bidang yang bersesuaian dengan rencana, manfaat, dampak yang muncul yang memiliki concern (termasuk organisasi massa yang terkait). Perguruan Tinggi yakni kelompok akademisi ini memiliki pengaruh penting dalam pengambilan keputusan pemerintah serta Pengusaha (Badan usaha) yang terkait sehingga mereka juga masuk dalam kelompok stakeholder pendukung.

Sedangkan Stakeholder kunci merupakan stakeholder yang memiliki kewenangan secara legal dalam hal pengambilan keputusan. Stakeholder kunci yang dimaksud adalah unsur eksekutif sesuai levelnya, legislatif dan instansi. Misalnya, stakeholder kunci untuk suatu keputusan untuk suatu proyek level daerah kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten, DPR Kabupaten serta dinas yang membawahi langsung proyek yang bersangkutan.

Menurut Nugroho (2014) stakeholder dalam program pembangunan dapat diklasifikasikan berdasarkan perannya, yaitu :

- a. Policy creator , stakeholder yang berperan sebagai pengambil

- keputusan dan penentu suatu kebijakan.
- b. Koordinator, stakeholder yang berperan mengkoordinasikan stakeholder lain yang terlibat.
  - c. Fasilitator, stakeholder yang berperan memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan kelompok sasaran.
  - d. Implementer, stakeholder pelaksana kebijakan yang di dalamnya termasuk kelompok sasaran.
  - e. Akselerator, stakeholder yang berperan mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai sasaran dan lebih cepat pencapaiannya.

### Konsep Peran

Peranan (role) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.(Soekanto, 2009:212-213).

Levinson dalam Soekanto (2009:213) mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang

penting bagi struktur sosial masyarakat.

Merton dalam Raho (2007 : 67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status social khusus. Wirutomo (1981 : 99 – 101) mengemukakan pendapat David Berry bahwa dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan social tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain.

Selanjutnya dikatakan bahwa di dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya. Dalam pandangan David Berry, peranan-peranan dapat dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola peranan yang saling berhubungan.

### **Peran Stakeholder dalam Implementasi Full Day School**

Berdasarkan dari data di atas, maka prinsipnya walaupun kebijakan ini dibuat seolah terburu-buru namun mendapat dukungan yang berarti dari *stakeholder*. Peran dari masing-masing yang terlibat kebijakan ini seperti yang dikatakan Merton dalam Raho (2007 : 67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status social khusus. Dalam konteks dengan program FDS ini peran stakeholder sudah sesuai dengan status tertentu yang di punyai dalam mendukung program pemerintah FDS.

Wirutomo (1981 : 99 – 101) mengemukakan pendapat David Berry bahwa dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan social tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain.

Selanjutnya dikatakan bahwa di dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam

menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya. Dalam pandangan David Berry, peranan-peranan dapat dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola peranan yang saling berhubungan.

Namun dari sisi kebijakan ada ketidak mantapan dalam kebijakn FDS. Full Day School merupakan istilah di mana pembelajaran dilakukan dalam sehari. Setengah hari pembelajaran akademis dan dilanjutkan kegiatan ekstrakurikuler. Istilah ini kembali menyeruak setelah terjadi pergantian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang menggagas program tersebut. Tujuan program ini ialah untuk mencapai keseimbangan antara kemampuan akademik dengan keunggulan karakter. Jika dilihat dari segi tujuan, program ini sangatlah pantas untuk diterapkan. Namun melihat kondisi geografis dan sosial-budaya di setiap daerah tidaklah sama membuat program ini perlu untuk dikaji lebih dalam, seperti apa yang dikemukakan oleh Grindle itu dalam buku berjudul *Public Choice and Policy Change The Political Economy of Reform in Developing Countries*, Merile S Grindle dan John W Thomas (1991) mengungkap banyak sisi tentang konsep pilihan publik dan perubahan kebijakan di negara dunia berkembang dalam perspektif ekonomi politik. Bagi Grindle perubahan kebijakan yang terjadi pada tahun 1980 sampai 1989 di negara berkembang menandai terjadinya perubahan yang mendasar dalam kebijakan publik di dunia. Mereka mencontohkan kebijakan perestroika di Uni Soviet telah mampu mengubah hegemoni dari aparat birokrasi pemerintah yang semula sentralistik menjadi lebih efisien dan dinamis dalam hal ekonomi. Demikian halnya yang terjadi di Eropa Barat, perbaikan ekonomi telah mendukung adanya perubahan politik. Sukses Mao dalam desentralisasi di Cina, juga

mengubah watak birokrasi yang semula berkuasa penuh secara hirarkis dan bersifat kaku di bawah kontrol negara menjadi lebih baik berkat adanya persaingan pasar. Grindle juga menunjukkan perubahan kebijakan dalam bentuk lain seperti yang terjadi di Inggris Raya dan Amerika Serikat yang semula konservatif menjadi terbuka terhadap perubahan kebijakan berkat adanya inisiatif kebebasan individu dan persaingan pasar, sehingga meningkatkan tanggungjawab pemerintah dalam ekonomi dan kesejahteraan rakyat sebagai suatu pilihan publik.

Terkait dengan perubahan ini, sejumlah analis sempat pesimis karena reformasi kebijakan dicurigai hanya untuk kepentingan beberapa kelompok penting dalam masyarakat atau kepentingan dari pejabat publik yang melakukan praktik *rent seeking* bagi kepentingan mereka sendiri. Namun seiring dengan adanya kebijakan utama dan inovasi kelembagaan yang terjadi di negara berkembang ditandai oleh munculnya beberapa pandangan positif dari para pejabat publik yang mengadopsi kebijakan baru tersebut, maka pandangan tersebut dengan sendirinya luluh. Perubahan demikian berlanjut pada tahun 1986 dimana secara umum kerangka kebijakan difokuskan kepada reformasi kebijakan di negara berkembang melalui adanya reformasi kelembagaan sebagaimana yang terjadi sampai tahun 1988. Pada tahun 1989 muncul dukungan dari lembaga pembangunan ekonomi Bank Dunia terhadap adanya modifikasi kebijakan khususnya yang terkait dengan proses reformasi dan beberapa strategi dalam perubahan kebijakan dan kelembagaan.

Perubahan kebijakan dari perspektif ekonomi politik di negara berkembang menjadi pengalaman berharga bagi para pejabat publik dalam melakukan reformasi kebijakan meskipun motivasi mereka berbeda-beda, seperti motif untuk kepentingan sendiri, kepentingan kelas

atau kepentingan organisasi yang disadarinya memiliki peran yang hebat. Namun satu hal yang membuat mereka optimis adalah munculnya pemahaman tentang konsep pilihan publik bahwa perubahan kebijakan itu dilakukan untuk kepentingan publik demi kesejahteraan masyarakat. Bagi Grindle perubahan kebijakan dengan demikian telah berorientasi kepada upaya untuk memenuhi kepentingan publik baik di tingkat perumusan maupun implementasi kebijakan menuju masa depan yang lebih baik.

Grindle secara khusus juga menjelaskan tentang kajian ekonomi politik dalam reformasi kebijakan, salah satunya diindikasikan oleh adanya reformasi ekonomi dan reformasi organisasi khususnya yang menyangkut; bagaimana agenda *setting* (reformasi kebijakan menjadi bagian dari agenda), pembuatan kebijakan (bagaimana elit-elit kebijakan menerima perubahan kebijakan dan perubahan kelembagaan), serta implementasi kebijakan (pandangan politik tentang perubahan dan tekanan ekonomi politik pada kebijakan, dampak keputusan atas eksistensi kebijakan dan relasi birokratik, serta keberlanjutan implementasi pada administrasi yang efektif, bukan proses politik sebagaimana Grindle menjelaskan:

*Our in the process of policy and institutional change has led us to investigate policy decision making and implementation within government. We are concerned centrally with the issue of reform, defined here as deliberate efforts on the part of government to redress perceived errors in prior and existing policy and institutional arrangements* (Grindle, 1991 h 4). (Proses kebijakan dan perubahan kelembagaan telah kita telusuri kepada pembuatan keputusan publik dan implementasinya dalam pemerintah. Perhatian kami terpusat kepada isu-isu reformasi sebagai usaha pertimbangan

yang mendalam atas bagian dari pemerintah yang merasa gagal dalam kebijakan dan susunan kelembagaan yang ada sebelumnya.

## KESIMPULAN

Sebenarnya untuk mencapai keseimbangan antara kemampuan akademik dengan kualitas karakter tidaklah harus mengedepankan keberadaan siswa di sekolah. Karena kita tahu bahwasanya di Indonesia sendiri mayoritas masyarakatnya masih mengalami keterbelakangan dalam hal semangat belajar jika dibandingkan dengan negara lain yang lebih maju. Lagi pula jika dilihat dari segi ideologis Indonesia, Indonesia bukanlah negara Kapitalis ataupun Liberalis. Di mana setiap penduduknya mengutamakan uang dan kepentingan individu. Berbeda dengan negara maju, di sana program *Full Day School* sangat cocok diterapkan. Karena para orang tua di negara maju tidak cukup memiliki waktu luang untuk mendidik dan mengawasi putra-putri mereka dan pihak sekolahlah yang sangat dibutuhkan untuk membantu masalah tersebut. Salah satunya dengan program *Full Day School*. Keadaan ini sangat jauh dengan apa yang dialami oleh Indonesia, dimana orang tua tertentu saja yang tidak punya waktu untuk meamastikan waktu dengan anak-anaknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul wahab, Solichin. 1997. *Analisis Kebijakan- Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta
- 1998. *Reformasi Pelayanan Publik Menuju Sistem Pelayanan Yang Responsif dan Berkualitas*, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Malang.
- 1999. *Reformasi Pelayanan Publik Kajian Dari Perspektif Teori Governance*, Pidato Pengukuhan

- Guru Besar dalam Ilmu Kebijakan, FIA UNIBRAW, Malang.
- Abdul Wahab, Solichin. Putra, Fadilah. Arif, Saiful., 2002. *Masa Depan Otonomi Daerah*, SIC, Surabaya
- Astar hadi, 2007. *Teori Pilihan Rasional(prespektif ekonomi politik)*, Makalah.
- Bahrum,Samsul, 2011. *Memperkuat Tiga Geo-Pembangunan di Zona Perbatasan*.
- George Ritzer, 2002. *Ketika Kapitalisme Berjingkrak*, Pustaka Pelajar, yogyakarta
- Grindle, Merilee S. (ed) (1980), *Politics and Policy Implementation in the Third World*, Princeton University Press, New Jersey .
- Grindle, Merilee S. and Thomas, J (1991). *Public Choice and Policy change. The Political Economy of Reform in Developing Countries*. Baltimore. John Hopkin University Press
- Grindle S Mirrelle, 2007. *Going Local Decentralization Democratization, and The Promise of Good Governance*, Princeton University Press, 41 William Street, Princeton, New Jersey 08540.
- Habermas, Jurgen. 1979. *Communication and the Education of Society*. London: Heinemann
- Habermas, Jurgen, 2004. *Krisi Legitimasi*. Cv Qalam. Yogyakarta.
- Hajer, Maarten A and Hendrik Wagenaar. 2003. *Deliberative Policy Analysis, Understanding Governance in the Network Society*. Cambridge Universit Press
- Hakim Lukman, 2007, *Pengantar Administrasi pembangunan*, Ar-Russ Media, Yogyakarta
- Husnadi 2006, *Menuju Model Pengembangan Kawasan Perbatasan Darat Antar Dua Negara*, UNDIP, Semarang.
- Mills, Wright, C., 1956, *The Power Elite*, Oxford University Press, New York.

